

Anggaran TPP Naik

● Beban Kerja Pegawai Pemprov Tak Bertambah

SEMARANG - Meski dikritik DPRD dan dinilai melanggar aturan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemprov Jateng justru dinaikkan.

Kenaikan pada APBD Perubahan 2015 itu diberlakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptakaru).

Anggaran yang masuk dalam belanja tidak langsung tersebut ditambah karena gaji PNS naik 6% per 1 Januari 2015. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara

(PPAS) APBD Perubahan 2015 di Komisi D DPRD Jateng, Senin (3/8), disebutkan TPP untuk PNS Dinas PSDA naik Rp 10.297.640.000, dari Rp 73.001.922.000 menjadi Rp 83.299.562.000.

TPP di Dishubkominfo naik Rp 5.926.393.000, dari anggaran murni Rp 70.411.143 miliar menjadi Rp 76.337.536.000. Adapun untuk Dinas Ciptakaru naik Rp 2.489.649.000 atau 9,64% dari Rp 25.832.609.000 menjadi Rp 28.322.258 miliar.

Anggota Komisi D Abdul Azis

mengatakan, kenaikan TPP perlu dikoreksi. Sebab, tak ada kegiatan baru birokrasi, bahkan beban kerja tidak bertambah.

"Di Dinas Ciptakaru saja ada potensi sembilan kegiatan yang menyerap anggaran Rp 33,504 miliar tidak bisa dilaksanakan. Masa dengan banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilakukan, TPP naik," tandasnya.

Kesalahan Sistemik

Menurut politikus PPP tersebut, jika banyak kegiatan dan program tidak bisa direalisasikan, maka TPP tidak perlu ditambah. Sebab, dasar pemberian TPP adalah tambahan beban kerja.

"Di Dinas PSDA, belanja langsung saja hanya bertambah Rp 4.869.346.000. Begitu juga di Dinas Ciptakaru yang justru

turun Rp 595.420.000," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mengatakan, pihaknya akan segera berkonsultasi dengan pimpinan Dewan agar persoalan tersebut dibahas di Badan Anggaran (Banggar).

Kepala Dishubkominfo Jateng Satriyo Hidayat mengatakan, TPP 2015 baru dianggarkan selama 10 bulan, sehingga anggaran perubahan dimulai November 2015.

Kepala Dinas Ciptakaru Maladiyanto menambahkan, pihaknya menyerahkan keputusan soal TPP kepada Gubernur dan DPRD. "Beban kerja yang berkurang karena ada sembilan kegiatan tidak bisa dilaksanakan bukan akibat kesalahan pegawai, melainkan kesalahan sistemik lantaran ada peraturan yang berubah," terangnya. (J8,H81-59)